



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**(LKjIP)
2018**

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG
2019**

DAFTAR ISI

	Hal	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Maksud dan Tujuan	1
	C. Tugas Pokok dan Fungsi	2
	D. Susunan Organisasi	2
	E. Sistematika Penyusunan LKjIP	4
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	5
	A. Visi dan Misi	5
	B. Tujuan dan Sasaran	6
	C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	8
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	9
	A. Capaian Kinerja Organisasi	9
	B. Realisasi Anggaran	11
BAB VI	PENUTUP	14
	A. Kesimpulan	14
	B. Saran	14

IKHTISAR EKSEKUTIF

Good Governance merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita yang telah ditetapkan. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban amanah atau mandat yang melekat pada suatu Pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan dokumen LKjIP dan Perjanjian Kinerja (PK) berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan landasan pemikiran tersebut, LKjIP Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 ini disusun. LKjIP menyajikan capaian kinerja dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang selama tahun 2018 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dan Penetapan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2018. Keberhasilan pelaksanaan beberapa kegiatan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang ini tentunya juga berkat dukungan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan juga serta partisipasi semua pihak secara umum.

Namun demikian, selain beberapa keberhasilan di atas, beberapa kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini menjadi catatan bagi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang dalam upaya meningkatkan kinerja di masa mendatang, sehingga apa yang menjadi Tupoksi serta visi dan misi Bappeda dapat diwujudkan.

Padang Panjang, Januari 2019

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

SONNY BUDAYA PUTRA, AP. M.Si

Pembina Utama Muda/NIP. 19750331 199501 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Peraturan Presiden ini mewajibkan setiap Kepala OPD untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerjanya kepada Walikota sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), penetapan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2018 serta pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran yang dikelolanya. Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2018.

LKjIP Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja masing-masing program dan kegiatan yang diukur dari pencapaian sasaran dan pencapaian kegiatan. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja input, output, dan outcome yang telah ditetapkan dan realisasi hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2018.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang adalah memberikan informasi yang akuntabel dan transparan mengenai pertanggungjawaban keberhasilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pencapaian dari penetapan kinerja pada tahun 2018, yang dilaksanakan

melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai perwujudan akutabilitas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan tugas penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Adapun fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis urusan penunjang bidang Perencanaan, dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. pengkoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan daerah;
3. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
5. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

D. Susunan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.
3. Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi dan Informasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan;
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; dan
 - c. Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan.
4. Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pembangunan Manusia;
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya; dan
 - c. Sub Bidang Pemerintahan.
5. Bidang Ekonomi, Sumberdaya Alam dan Infrastruktur, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
 - c. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Teknologi dan Inovasi Daerah;
 - b. Sub Bidang Pengkajian Pembangunan Manusia, Sosial, Budaya dan Pemerintahan; dan
 - c. Sub Bidang Pengkajian Ekonomi, Sumberdaya Alam dan Infrastruktur.
7. UPT; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang didukung oleh 39 (tiga puluh sembilan) orang personil yang terdiri 13 orang Golongan IV, 16 orang Golongan III, 4 orang Golongan II, 1 orang Golongan I dan 6 orang tenaga harian lepas.

E. Sistematika Penyusunan LKjIP

LKjIP Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Penjelasan Umum Organisasi
- D. Sistematika Penyusunan LAKIP

Bab II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi – Misi
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Penetapan Kinerja Tahun 2018

Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

Bab IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 (Tahun Pelaksanaan 2018), dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi Pemerintah Kota Padang Panjang, maka ditetapkan Visi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Padang Panjang sebagai berikut :

” Perencanaan yang Berkualitas dan Litbang yang Inovatif menuju Padang Panjang yang Amanah, Aman dan Sejahtera”

Visi tersebut merupakan penjabaran dari visi jangka menengah Kota Padang Panjang yang tertuang didalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018, yaitu :

” PADANG PANJANG AMANAH, AMAN DAN SEJAHTERA”

Makna pokok yang terkandung dalam Visi di atas adalah bahwa perencanaan pembangunan dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yakni :

1. *Partisipatif*, yaitu perencanaan pembangunan dirumuskan dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder lainnya dalam proses tahapan perencanaan pembangunan daerah.
2. *Responsif*, yaitu perencanaan pembangunan dirumuskan merupakan respon dan antisipasi atas berbagai potensi dan permasalahan yang terjadi atau akan terjadi di tengah masyarakat.
3. *Akuntabel*, yaitu hasil dari pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. *Transparan*, yaitu perencanaan pembangunan yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan

jujur terhadap proses dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

5. *Terukur*, yaitu perencanaan pembangunan yang memiliki target-target kinerja yang dapat diukur sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
6. *Efektif dan Efisien*, yaitu perencanaan pembangunan yang dirumuskan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan cara yang optimal, serta dengan mengusahakan masukan yang terendah untuk mencapai keluaran yang maksimal.

Berdasarkan uraian visi di atas, berikut ini ditetapkan misi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang yaitu :

1. Mewujudkan dokumen perencanaan yang berkualitas, dan penelitian dan pengembangan yang inovatif

B. Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang periode 2013-2018, maka dirumuskan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis, yang menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah selama kurun waktu lima tahun ke depan.

Tujuan pembangunan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah periode 2013-2018 (Tahun Pelaksanaan 2018) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

2. Mewujudkan hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif dalam kebijakan daerah

Strategi dalam Mencapai Tujuan

Setelah ditetapkan visi dan misi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tersebut, maka dirumuskan juga strategi yang akan digunakan untuk mencapai target yang akan dituangkan dalam Program dan Kegiatan, sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif	Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang ekonomi sumber daya alam dan infrastruktur	Meningkatkan kualitas perencanaan bidang ekonomi sumber daya alam dan infrastruktur
			Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang ekonomi sumber daya alam dan infrastruktur
		Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang Pembangunan manusia, sosial budaya pemerintahan	Meningkatkan kualitas perencanaan bidang Pembangunan manusia, sosial budaya pemerintahan
			Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang Pembangunan manusia, sosial budaya pemerintahan
		Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
			Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah
			Meningkatkan kualitas data pembangunan daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Mewujudkan hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif dalam kebijakan daerah	Melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan di segala bidang	Peningkatan pelaksanaan, Program yang berkaitan dengan isu-isu aktual program strategis Pemerintah Daerah
		Melaksanakan koordinasi pengembangan Inovasi Daerah berbasis IPTEK	Membangun jejaring kerjasama kelembagaan dengan stakeholders terkait

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sesuai dengan Perubahan penetapan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Walikota dan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang, maka terjadi beberapa perubahan target capaian kinerja yaitu :

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif	Persentase konsistensi dokumen RPJMD ke dalam RKPD	75 %	75 %
		Persentase konsistensi dokumen RKPD ke dalam APBD	70 %	70 %
		Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam APBD	70 %	70 %
2.	Mewujudkan hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif dalam kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian/kajian dalam perumusan kebijakan daerah	20 %	20 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Tupoksi Bappeda seperti yang dijelaskan pada Bab sebelumnya dan sesuai dengan perubahan penetapan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018, maka dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan seluruh program kegiatan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang dapat digolongkan dalam beberapa indikator kinerja yang sama dalam menilai indikator kinerja, yaitu :

Sasaran 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran mewujudkan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan 3 indikator kinerja sasaran, dengan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat ***Sangat Berhasil***.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase konsistensi dokumen RPJMD ke dalam RKPD	75 %	75 %	100 %
2.	Persentase konsistensi dokumen RKPD ke dalam APBD	70 %	70 %	100 %
3.	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam APBD	70 %	70 %	100 %

Pencapaian indikator kinerja Persentase konsistensi dokumen RPJMD ke dalam RKPD mencapai 75% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100%. Persentase konsistensi dokumen RKPD ke dalam APBD mencapai 75% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100%. Dan Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam APBD mencapai 75% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100%. Capaian ini cukup

bagus sesuai target, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2017 karena berubahnya tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 (Tahun Pelaksanaan 2018).

Untuk mendukung pencapaian sasaran dilaksanakan melalui 5 (lima) Program dengan 23 (dua puluh tiga) Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp.2.124.406.000,- dengan realisasi Rp.1.794.633.265,- atau 84,48%

Program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
2. Program Peningkatan Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Pengembangan Data/Informasi
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Sasaran 2 : Mewujudkan hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif dalam kebijakan daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran mewujudkan hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif dalam kebijakan daerah dengan 1 indikator kinerja sasaran yakni persentase hasil penelitian/kajian dalam perumusan kebijakan daerah, dengan angka capaian kinerja sasaran sebesar 150% dengan predikat **Sangat Berhasil** melebihi target yang telah direncanakan.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Presentase hasil penelitian/kajian dalam perumusan kebijakan daerah	20 %	30 %	150 %

Pencapaian indikator kinerja Persentase hasil penelitian/kajian dalam perumusan kebijakan daerah Tahun 2018 mencapai 30% sedangkan target hanya 20% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 150%. Capaian ini sangat bagus melebihi target, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2017 karena berubahnya tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 (Tahun Pelaksanaan 2018).

Untuk mendukung pencapaian sasaran mewujudkan hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif dilaksanakan melalui 1 (satu) Program dengan 9 (sembilan) kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp.679.760.000,- dengan realisasi Rp.589.893.352,- atau 86,78%.

Program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penelitian dan Pengembangan

B. Realisasi Anggaran

Untuk melihat capaian realisasi keuangan maka ada beberapa sasaran strategis yang dapat di rangkum dan dijadikan sebagai ukuran, yaitu :

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif	Program Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	27.500.000	20.167.404	73,34
		1. Pemantauan P3MK	27.500.000	20.167.404	73,34
		Program Pengembangan Data/Informasi	228.075.000	199.504.728	87,47
		1. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	34.000.000	30.235.200	88,93
		2. Sistem Informasi Manajemen Perencanaan	194.075.000	169.269.528	87,22
		Program Peningkatan Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	77.000.000	76.738.420	99,66
		1. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	77.000.000	76.738.420	99,66
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.033.936.000	830.193.665	78,00
		1. Penyusunan Rancangan RPJMD	270.800.000	210.212.863	77,63
		2. Pelaksanaan Forum SKPD Gabungan	48.325.000	28.190.100	58,33

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
		3. Penyusunan Rancangan RKPD	14.750.000	14.481.800	98,18
		4. Musrenbang RKPD	59.240.000	59.048.300	99,68
		5. Penyusunan KUA	18.500.000	12.275.300	66,35
		6. Penyusunan PPA	212.625.000	199.247.700	93,71
		7. Penyusunan KUA - PPA Perubahan	158.825.000	109.934.460	69,22
		8. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD 2013 -2018	10.400.000	8.874.900	85,34
		9. Investigasi Usulan Kegiatan Pembangunan	44.071.000	44.042.900	99,94
		10. Review RPI2JM	4.150.000	4.150.000	100,00
		11. Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	19.200.000	10.675.100	55,60
		12. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	21.900.000	16.996.900	77,61
		13. Penyusunan RKPD Perubahan	16.250.000	8.525.000	52,46
		14. Optimalisasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	11.400.000	278.300	2,44
		15. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari APBN	18.950.000	10.718.500	56,56
		16. Faslitasi Teknis Penyusunan Renja dan Renstra OPD	104.550.000	92.541.542	88,51
		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	105.635.000	98.303.100	93,06
		1. Pemantauan Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesejahteraan Sosial	60.350.000	54.001.950	89,48
		2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PUG	36.880.000	36.657.300	99,40

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
		3. Pemantauan dan Pelaksanaan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (TKPP)	8.405.000	7.643.850	90,94
2.	Mewujudkan hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif dalam kebijakan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	679.760.000	589.893.352	86,78
		1. Penelitian dan Kajian Sosial	95.400.000	78.914.899	82,72
		2. Penelitian dan Kajian Ekonomi Infrastruktur	93.100.000	77.761.600	83,52
		3. Diskusi Aktual Pembangunan Daerah	33.450.000	26.958.880	80,59
		4. Forum Koordinasi Kelitbangan	128.940.000	107.636.080	83,48
		5. Penguatan Kelembagaan DRD	70.855.000	69.058.993	97,47
		6. Lomba Karya Ilmiah IPTEK	41.250.000	36.724.400	89,03
		7. Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan dan Perwako Kelitbangan	7.400.000	6.632.500	89,63
		8. SIMPUL PANDANG (Seminar Penelitian Unggula Padang Panjang)	30.012.500	24.204.200	80,65
		9. Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah	179.352.500	162.001.800	90,33

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan rata-rata capaian realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2018 adalah sebesar 86,78%.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara kuantitatif, kegiatan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang tahun 2018 telah dilaksanakan dengan baik, dengan capaian kinerja secara keseluruhan mencapai 98,09%. Sedangkan capaian kinerja keuangan mencapai 87,91%. Dari sisi keuangan, hal ini mengindikasikan terjadinya efisiensi dari pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan.

B. Saran

Dalam rangka menerapkan prinsip Good Governance, khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan, masih sangat diperlukan komitmen bersama dari seluruh *stakeholders*, khususnya konsistensi dalam pelaksanaan perencanaan sebagaimana telah direncanakan dan disusun serta dituangkan dalam dokumen perencanaan, sehingga capaian kinerja kegiatan dapat diukur keberhasilannya.

Padang Panjang, Januari 2019
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

SONNY BUDAYA PUTRA, AP. M.Si
Pembina Utama Muda/NIP. 19750331 199501 1 001